


**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	EVIDEN
1	Sasaran Program : Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Penugasan dari Kepala Badan Keahlian)															
	1. Indikator Kinerja 1 : Persentase Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%			25%			25%			25%			25%	Laporan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2023
	2. Indikator Kinerja 2 : Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%						50%						50%	Laporan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2023
	3. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Mengarahkan Pelaksanaan kegiatan Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%			25%			25%			25%			25%	Laporan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2023
	4. Indikator Kinerja 4 : Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Mengarahkan Pelaksanaan Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	91%			25%			25%			25%			25%	Hasil Survey
	5. Indikator Kinerja 5 : Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Laporan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2023
		Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Perkantoran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	

KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG


 Dra. TANTI SUMARTINI, M.Si
 NIP.196310011988032001